

Pemilihan Kepemimpinan Kepala Daerah Visioner Di Kota Surabaya

Oleh :

Asmuriyono

Alumni Program Magister Administrasi
Pascasarjana – Untag Surabaya

ABSTRACT

Local elections directly elected by the people who provide its own color pattern or against the government, especially the enactment of Act No. 32 of 2004, stated that people have the power to elect the Governor / Deputy Governor, the Regent / Deputy Regent or mayor / deputy mayor. This study aimed to analyze the characteristics of visionary local leadership and resources to analyze the function of supporting the visionary leadership elections of regional heads directly. Furthermore, the focus of this study, are as follows: (a) observed karakteristik leadership candidate regional head / mayor in the election of local leadership in Surabaya, (b) observing the support resources that influence the selection of areas that include leadership, attitudes and behavior in support of a worthy candidate to lead the area, and (c) observing the behavior of the people in the choice of the Candidate Head of Region at the time of implementation of local elections. While the analysis of the data using descriptive qualitative approach. The first results show, for the implementation of direct elections held, the reality has yet to produce an appropriate regional head leader societal expectations, it is because regional head candidates elected not reflect the characteristics of a visionary leader. This is because local elections are no longer an effective means, there is an issue in many ways, many people believe that elections merely as a means for someone who has a particular interest to achieve their own interests, not the interests of the people again, and second, the results of research indicate that the function of supporting resources to the elected leadership is influenced by regional heads: the level of public trust, the quality of candidate the personality of the candidate and the head area. Three aspects are used as a factor for consideration in selecting candidates for regional leadership.

Key Words: *Head of Regional Election and Visionary Leadership*

PENDAHULUAN

Salah satu ciri Negara demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik, termasuk pemilihan pejabat publik pada tingkat lokal diselenggarakannya pemilihan umum secara periodik dan berkala yang ditujukan untuk memilih seorang pejabat publik baik pada tingkat lokal maupun nasional. Pemilu yang akan datang menjadi harapan sekaligus pertarungan besar bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Bukan saja bagi para politisi yang berharap melenggang ke Senayan, namun terlebih lagi bagi keseluruhan rakyat dan bangsa Indonesia yang begitu berharap untuk

mampu melewati proses transisi menuju kehidupan demokrasi yang lebih baik.

Namun demikian, di tengah harapan yang besar itu, muncul pula kekhawatiran akan gagalnya proses politik yang demokratis itu. Sejumlah kekhawatiran itu muncul terutama karena proses politik ke arah itu masih menyiratkan minimnya partisipasi publik di satu sisi dan kuatnya oligarki partai di sisi yang lain. Kondisi ini menyebabkan pemilu terjerembab sekadar menjadi pesta demokrasi untuk mengantarkan elit politik semata, bukan menjadi sarana atau mekanisme untuk menyalurkan kepentingan publik secara nyata. Singkatnya, pemilihan umum memang merupakan capaian yang penting, namun ternyata sistem

partai dan representasi politik tidak berjalan dengan baik. Ini yang secara singkat kemudian disebut sebagai representasi politik yang bermasalah (Priyono, Samadhi, Tornquist, dkk., 2007). Potret seperti ini ternyata semakin terlihat dalam Pemilihan Kepemimpinan Kepala Daerah (Pilkada) yang kini terus berlangsung di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk jabatan gubernur, walikota/bupati.

Sehubungan dengan perubahan model pengisian jabatan tersebut di atas, penting kiranya untuk dilacak apakah pemerintahan daerah semakin membaik, semakin demokratis atau sebaliknya. Pemilihan pemimpin pemerintahan atau kepala daerah secara langsung sebagaimana diamanatkan dalam

Pemilihan kepala daerah secara langsung dipilih oleh masyarakat memberikan corak atau warna tersendiri terhadap pemerintahan yang akan terbentuk, apalagi diberlakukannya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana dijelaskan bahwa masyarakat mempunyai kewenangan untuk memilih Gubernur/wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/wakil walikota.

Dari pengalaman-pengalaman inilah pada gilirannya diharapkan akan dapat dilahirkan politisi-politisi atau pemimpin-pemimpin visioner yang handal yang dapat bersaing di tingkat nasional. Pemilihan kepala daerah langsung juga menciptakan pola rekrutmen pimpinan lokal dengan standar yang jelas. Dengan Pemilihan kepala daerah langsung maka akan terjadi rekrutmen pimpinan politik yang berasal dari daerah (lokal), bukan didrop dari pusat. Dengan Pemilihan kepala daerah langsung, rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya akan meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatan.

Kekhawatiran bahwa pemilihan kepala daerah langsung tidak menghasilkan pemerintahan daerah yang akuntabel sebetulnya justru dikondisikan oleh kuatnya keinginan dan pertarungan untuk memiliki pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Di satu sisi sering mendengar janji kandidat dan pengamat pemi-

lu, dalam hal ini pemilihan kepala daerah langsung, adalah langkah strategis untuk demokratisasi dan pengembangan akuntabilitas pemerintahan ditingkat lokal. Namun disisi lain, tidak jarang ditemukan kasus yang mengisyaratkan bahwa pemilu lokal justru menghasilkan berbagai bentuk keprihatinan. Keprihatinan yang dihadapi sebetulnya paralel dengan keprihatinan yang melanda berbagai penjuru dunia (Afifi, Loy dan Susilastuti, 2005).

Pernyataan tersebut didukung oleh Gallup Internasional Millenium (dalam Afifi, Loy dan Susilastuti, 2005), dalam suatu polling terhadap 50.000 orang di 60 negara. Dalam laporan tersebut ditunjukkan bahwa hanya 10% responden yang mengatakan bahwa merespon kehendak rakyat. Laporan tersebut mengisyaratkan bahwa, sesungguhnya demokrasi telah menjadi aspirasi global, masyarakat di berbagai dunia tidak puas dengan kinerja pemerintah.

Beberapa hal yang mendorong dilaksanakan pemilihan kepala daerah langsung adalah: Pertama, system pemilihan perwakilan diwarnai banyak kasus. Kasus tersebut antara lain: (a) proses pelaksanaan pemilihannya melahirkan kasus-kasus seperti politik uang, trik dan intrik saat pemilihan oleh anggota DPRD, aksi boikot saat pelantikan, serta campur tangan pengurus partai baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam pencalonan maupun pemilihan, (b) kasus-kasus yang terkait dengan laporan pertanggungjawaban kepala daerah antara lain berupa pemerasan terhadap kepala daerah atau kasus-kasus suap, (c) upaya pemecatan kepala daerah. Hal ini terjadi terutama karena tidak diakomodasinya kepentingan DPRD oleh kepala daerah.

Kedua, pemilihan kepala daerah langsung, rakyat dapat berperan secara langsung. Dalam demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu ketika terbukti bahwa kedaulatan yang dititipkan kepada para wakil rakyat tidak dijalankan dengan penuh tanggung jawab. *Ketiga*, hasil pemilihan bisa dipastikan lebih obyektif. Maksudnya, siapapun yang terpilih, dialah yang dikehendaki oleh mayoritas rakyat. Meski seseorang yang mendapat suara terbanyak belum

tentu merupakan orang yang memiliki kecakapan yang ideal, namun hal itu harus diterima sebagai bentuk pembelajaran dalam demokrasi.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Jika tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Perlu diketahui keberhasilan seorang pemimpin pemerintahan dalam melaksanakan tugas sangat dipengaruhi oleh kualitas individunya (SDM). Oleh karena itu kualitas seseorang pemimpin pemerintah (kepala daerah) sangat diperlukan sekali, karena merupakan modal intelektual seseorang untuk mengembangkan daerahnya. Modal intelektual adalah materi intelektual, pengetahuan, informasi, hak pemilikan intelektual, pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kemakmuran dan kekayaan. Dengan demikian modal intelektual terdiri dari: pengetahuan, informasi, hak pemilikan intelektual dan pengalaman (Wasiono, 2003).

Disamping faktor kualitas individu, faktor kepribadian juga mempengaruhi pertimbangan di dalam memilih calon pemimpin pemerintahan (kepala daerah). Eysenck (dalam Suryabrata, 1993), kepribadian sebagai jumlah tota-

litas diri perilaku organisme secara actual maupun secara potensial yang ditentukan oleh faktor bawaan atau lingkungan. Berdasarkan hubungan antar individu dengan lingkungan sosialnya, maka Hall dan Lindzey (1993), mengartikan kepribadian sebagai keterampilan sosialnya, artinya kepribadian individu dinilai berdasarkan efektifitas kemampuan seseorang untuk mendatangkan reaksi-reaksi positif dari orang-orang sekitarnya dalam berbagai situasi (Hall dan Lindzey, 1979). Disamping pertimbangan kepribadian, faktor kepercayaan juga berpengaruh berhasil dan tidaknya dalam memenangkan posisi jabatan kepala daerah. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap calon kepemimpinan kepala daerah, akan semakin besar peluangnya untuk memperoleh kemenangan.

Seperti halnya Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah (walikota) secara langsung. Pemilihan kepala daerah langsung telah membawa angin segar bagi tumbuhnya demokrasi di tingkat lokal. Dengan pilihan langsung, masyarakat di daerah menjadi memiliki haknya yang paling hakiki dalam demokrasi yakni memilih sendiri pemimpinnya. Pemilihan langsung memberikan peran yang sangat besar bagi masyarakat dalam menentukan masa depannya sendiri. Disamping itu, pemilihan langsung diakui akan dapat menaikkan derajat legitimasi kepala daerah, yang menjadi permasalahan adalah faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan masyarakat Surabaya dalam menentukan pilihan calon kepala daerah. Karena bila masyarakat Surabaya salah di dalam menentukan pilihan calon kepala daerah, maka dibelakang hari akan menimbulkan suatu kekecewaan karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pada saat kampanye.

Permasalahannya dalam pemilihan kepemimpinan kepala daerah, pola rekrutmen pimpinan lokal belum mencerminkan keinginan masyarakat. Akibatnya kepemimpinan kepala daerah yang terpilih belum mampu mensejahterakan masyarakat di daerah. Ini dikarena tidak semua masyarakat mampu menentukan pilihan calon kepemimpinan kepala daerah dengan pertimbangan yang matang.

Berangkat dari fenomena di atas, maka dalam penelitian ini berupaya ingin mengetahui pertimbangan-pertimbangan apa saja yang menjadi persyaratan masyarakat Surabaya dalam memilih calon kepemimpinan kepala daerah. Karena tidak semua masyarakat Surabaya mampu membuat pertimbangan yang rasional untuk menentukan siapa yang akan dipilih menjadi kepala daerah. Perlu diketahui bahwa legitimasi yang diberikan oleh pemilih kepada proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung akan sangat berpengaruh terhadap legitimasi kepala daerah terpilih, karena kepala daerah yang tidak mendapatkan legitimasi penuh dari pemilih akan mengurangi nilai demokrasi itu sendiri. Sumber daya pendukung yang menjadi pertimbangan di dalam memilih kepemimpinan kepala daerah, antara lain adalah faktor kualitas individu (calon kepala daerah), kepribadian dan kepercayaan masyarakat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (a) Bagaimanakah Karakteristik Kepemimpinan Kepala Daerah Visioner?. dan (b) Bagaimanakah Fungsi Sumber Daya pendukung pemilihan kepemimpinan Kepala Daerah Visioner secara langsung?.

METODE

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Mengamati karakteristik calon kepemimpinan kepala daerah/walikota pada pelaksanaan pemilihan kepemimpinan kepala daerah di Surabaya.
- b. Mengamati sumber daya pendukung yang berpengaruh terhadap pemilihan kepemimpinan kepala daerah yang meliputi, sikap dan perilaku masyarakat dalam mendukung calon yang dianggap layak untuk memimpin daerah.
- c. Mengamati perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan salah satu dari Calon Kepala Daerah pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, bahwa analisis bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-simpulan umum. Didalam penelitian ini, kesimpulan umum bisa berupa kategorisasi. Misalnya kategori pemilihan kepemimpinan kepala daerah dikatakan berhasil, kalau ciri-ciri kepemimpinannya sesuai harapan masyarakat. Dikatakan kategori pemilihan kepemimpinan kepala daerah gagal, kalau ciri-ciri kepemimpinan kepala daerah tidak sesuai atau menyimpang dari norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN

Karakteristik Kepemimpinan Kepala Daerah Visioner

Salah satu perubahan mendasar dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi daerah yaitu proses seleksi kepemimpinan eksekutif lokal tidak lagi dipilih dan ditentukan oleh DPRD, tapi langsung oleh rakyat. Output pilkada diharapkan pemimpin eksekutif lokal yang bisa memenuhi preferensi mayoritas masyarakat lokal dan mempercepat terbentuknya pemerintahan daerah yang lebih baik (*good governance*). Dengan begitu, dari sisi substansi, pilkada diharapkan bisa melakukan proses seleksi pemimpin yang dinilai rakyatnya terbaik untuk melakukan perubahan-perubahan yang menjanjikan dan memberi manfaat kepada masyarakat luas.

Kepemimpinan visioner, adalah pola kepemimpinan yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberi arahan dan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas.

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dengan anggota partai, tokoh masyarakat, masyarakat dan KPU, dapat diketahui bahwa masyarakat dalam menentukan calon kepemimpinan kepala daerah, mempunyai pertimbangan yang sangat bervariasi antara individu yang satu dengan individu yang lain, tetapi dari hasil wawancara terlihat bahwa pertimbangan yang dipakai sebagai pedoman

pemilihan difokuskan pada sosok atau personel calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah, yaitu intelektual, kejujuran, kepercayaan masyarakat, kemampuan memimpin, dan mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Namun realitanya, secara umum hampir di semua daerah proses pilkada belum melahirkan pemimpin yang bisa melakukan perubahan mendasar untuk mempercepat kemajuan daerah, bahkan ada kecenderungan dengan pilkada justru menimbulkan sejumlah persoalan yaitu:

Pertama, pilkada ternyata tidak ada hubungan antara pemilih (konstituensi) dengan kompetensi. Seseorang calon kepala daerah walaupun dipilih dengan perolehan suara terbanyak tidak berarti menjadi kepala daerah yang memiliki kemampuan. Karena, dalam realitasnya proses rekrutmen pilkada, aspek kualifikasi kemampuan termarginalkan oleh faktor popularitas, kemampuan finansial, dan parpol pengusung. Di sinilah proses seleksi pemimpin menjadi bias karena realitas politik di masyarakat dan parpol baru sebatas penarikan dukungan belum sampai pada upaya pencarian pemimpin yang memiliki visi dan kapasitas memimpin pemerintahan. Kualifikasi dan kemampuan seseorang akan dikalahkan ketidakmampuannya dalam mengakses kepentingan partai politik.

Kedua, proses pengusungan calon dalam satu paket menimbulkan konflik karena formasinya bisa dilakukan secara beragam. Misalnya, kepala daerah diusung dari PDIP dan wakilnya dari kader Golkar. Bisa juga, calon kepala daerah dari parpol dan calon wakilnya dari birokrat. Jadi, dalam sistem satu paket, variasi pasangan bisa dari latar belakang yang berbeda. Saat proses pencalonan sampai pada pemilihan tidak ada masalah, namun ketika pasangan itu terpilih dan kemudian memimpin pemerintahan terjadi konflik kepentingan karena berbagai faktor seperti: kewenangan tidak bisa diimplementasikan secara efektif, kepala daerah/wakil kepala daerah bisa mengendalikan kepentingan partai politik, rebutan pengaruh kekuasaan dan kepentingan rebutan proyek.

Ketiga, legitimasi calon terpilih rendah. Aturan main calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam UU hanya mensyaratkan 25 %. Ketentuan ini telah menyebabkan terjadinya proses delegitimasi terhadap kepemimpinan kepala daerah. Dengan ketentuan ini seorang kepala daerah bisa terpilih dengan modal dukungan hanya sekitar 25 % dari total pemilih, artinya 75 % pemilih sesungguhnya tidak memberikan dukungan terhadap kepala daerah terpilih.

Keempat, ketimpangan dukungan politik dari DPRD. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih bisa berasal dari parpol yang tidak menguasai suara mayoritas di DPRD. Misalnya, calon terpilih dari PDIP, sementara di DPRD yang menguasai mayoritas adalah Partai Golkar atau partai demokrat. Jika seni kepemimpinan dan kemampuan komunikasi politiknya lemah, berpeluang untuk “dimain-mainkan” bahkan sangat mungkin dicari-cari kesalahan oleh DPRD untuk dijatuhkan kepemimpinannya. Juga, sangat berpeluang terjadi disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD; yang terjadi bukan bagaimana mengefektifkan penggunaan kekuasaan, tapi adalah bagaimana memperebutkan kekuasaan untuk kepentingan politik sesaat. Untuk itu kepemimpinan kepala daerah dibutuhkan seorang pemimpin yang visioner.

Ciri-ciri utama kepemimpinan visioner adalah: (1) Berwawasan ke masa depan : pemimpin visioner mempunyai pandangan yang jelas terhadap suatu visi yang ingin di capai, agar organisasi yang dia masuki dapat berkembang. Sesuai dengan visi yang ingin dia capai; (2) Berani bertindak dalam meraih tujuan, penuh percaya diri, tidak peragu dan selalu siap menghadapi resiko. Pada saat yang bersamaan, pemimpin visioner juga menunjukkan perhitungan yang cermat, teliti dan akurat. Dalam memperhitungkan kejadian yang di anggapnya penting; (3) Mampu menggalang orang lain untuk kerja keras dan kerjasama dalam menggapai tujuan. Pemimpin visioner adalah sosok pemimpin yang patut di contoh, dia mau membuat contoh agar masyarakat sekitar mencontoh dia; (4) Mampu merumuskan visi yang jelas, inspirasional dan menggugah, mengelola ‘mimpi’ menjadi kenyataan: pe-

mimpin visioner sangatlah orang yang mempunyai komitmen yang kuat terhadap visi di embannya, dia ingin mewujudkan visinya kedalam suatu organisasi yang dia masuki; (5) Mampu mengubah visi ke dalam aksi : dia dapat merumuskan visi kedalam misinya yang selanjutnya dapat diserap anggota organisasi. Yang dapat menjadikan bahan acuan dalam setiap melangkah kedepan; (6) Berpegang erat kepada nilai-nilai spiritual yang diyakininya : pemimpin visioner sangatlah profesionalitas terhadap apa yang diyakini, seperti nilai -nilai luhur yang ada di bangsa ini. Membangun hubungan secara efektif : pemimpin visioner sangatlah pandai dalam membangun hubungan antar anggota, dalam hal memotivasi, memberi, membuat anggotanya lebih maju dan mandiri. Secara tidak langsung hubungan itu akan terjalin dengan sendirinya. Mereka juga tidak malu- malu dalam member *reward* dan *punishment* terhadap anggotanya, tingkat integritasnya sangatlah tinggi; Inovatif dan pro-aktif : dalam berfikir pemimpin visioner sangatlah kreatif dia mengubah berfiir konvensional menjadiparadigma baru, dia sangatlah sosok pemimpin yang kreatif dan aktif. Dia selalu mengamati langkah-langkah kedepan dan isu-isu terbaru tentang organisasi/instansi.

Seorang pemimpin mengoptimalkan kemampuan seluruh "pemain" untuk bekerja sama, mengkoordinir aktivitas atau usaha mereka, ke arah "pencapaian kemenangan," atau menuju pencapaian suatu visi organisasi. Pemimpin, sebagai pelatih, menjaga pekerja untuk memusatkan pada realisasi visi dengan pengarahan, memberi harapan, dan membangun kepercayaan di antara pemain yang penting bagi organisasi dan visinya untuk masa depan. Dalam beberapa kasus, hal tersebut dapat dibantah bahwa pemimpin sebagai pelatih, lebih tepat untuk ditunjuk sebagai "*player-coach*."

Harper (2001) menyatakan bahwa kepemimpinan menghadapi suatu era perubahan pesat atau "*accelerating*" perubahan. Karenanya, waktu merupakan faktor penting untuk menjadikan seorang pemimpin visioner. Guna menghadapi perubahan pesat ini dengan baik, pemimpin harus memiliki serangkaian kompe-

tensi yang pokok seperti kemampuan antipresi, kecepatan, kecerdikan dan persepsi.

Antisipasi berarti bahwa kepemimpinan visioner harus secara pro aktif mengamati lingkungan guna menemukan perubahan yang secara negatif maupun positif mempengaruhi organisasi. Pemimpin harus secara aktif mendukung pekerja untuk bersiap setiap saat menghadapi perubahan pesat lingkungan, dan untuk mempertahankan pemimpin dan para manajer selalu menaruh perhatian atas hal tersebut. Menjadi "*perceptive, nimble* dan *innovative*" dalam lingkungan yang berubah pesat akan memberikan manfaat bagi organisasi. Sebagai tambahan, praktek menggunakan skenario "*what if*" menguntungkan bagi para pemimpin. Secara rutin, mempertimbangkan dan mendiskusikan kemungkinan seluruh skenario yang mungkin dapat terjadi pada masa depan, menjaga pemimpin visioner untuk memfokuskan dan menyiapkan beragam kemungkinan. Penciptaan rencana-rencana darurat dapat berguna untuk beberapa skenario.

Harper (2001), percaya bahwa *speed* merupakan faktor penting untuk mempertahankan posisi kompetitif, merespon secara kompetitif terhadap kebutuhan pelanggan dan menghemat uang. Pemimpin visioner melihat kecepatan sebagai sebuah kemampuan yang harus dikuasai guna memuaskan konsumen yang menginginkan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan seketika. Pelayanan yang cepat, bersahabat dan efisien merupakan contoh dari apa yang diinginkan oleh pelanggan terhadap pelayanan pemerintah. Teknologi informasi, pelayanan *on-line* melalui internet merupakan prasyarat bagi pemerintah dalam membentuk *highest quality service*. Hal ini menandakan, kecepatan pelayanan membantu pemerintah dalam meraih simpati dan kerja sama warga. Kecerdikan (*agility*) merupakan istilah lain yang secara perlahan berhubungan dengan kepemimpinan visioner.

Harper (2001) mengatakan bahwa kecerdikan merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk melihat ke depan dalam kaitan dengan faktor apa yang terletak di depan bagi sebuah organisasi (*perceptiveness*). Hal ini juga termasuk kapasitas untuk mempersiapkan dan juga menjadi fleksibel, guna membuat

perubahan atau penyesuaian untuk menghilangkan ancaman dan mengambil keuntungan dari oportunitas.

Perceptiveness merupakan kapasitas penting lain dari kepemimpinan visioner. Pemimpin harus waspada terhadap segala bentuk intrik dan perubahan di lingkungan eksternal. Kewaspadaan ini harus segera ditindaklanjuti guna merespon secara cepat dan tepat, dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Pada kasus dimana peluang dirasa ada, pemimpin harus segera bertindak. *Lead-time* juga penting bagi kesuksesan organisasi; karenanya, pemimpin visioner harus memiliki "*radar screens*" yang selalu menyala setiap saat. Pemimpin harus mengidentifikasi peluang yang muncul dan potensial, mempersiapkan serangkaian strategi dan memadukan seluruh sumber daya yang dibutuhkan, dan melayani serta memproduksi "*at opportune times*" guna memaksimalkan kesuksesan atau prestasi.

Menjadi seorang pemimpin apalagi kepala daerah bukanlah perkara mudah, yang dibutuhkan bukan hanya kesan kharismatik dan pencitraan di mata publik. Ia haruslah orang yang memiliki integritas dan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Bila itu terlewatkan, tidak mustahil sebuah negara akan hancur dan penduduknya akan menderita. Itu menjadi cerminan keadaan tatkala menjadi seorang pemimpin yang hanya bisanya mengeluh dan mengeluh. Ia menjadi pemimin bukan sebagai seorang yang hanya gila pangkat dan jabatan. Melainkan memiliki kriteria khusus yang patut untuk diteladani oleh rakyat. Kriteria tersebut meliputi hal-hal berikut :

Pertama, seorang pemimpin harus jelas memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME, karena agama sebagai landasan kehidupan manusia memegang peranan penting dalam kehidupan. Ajaran agama menjadi salah satu pondasi kuat yang akan membantu seorang pemimpin untuk terus bertahan dalam kondisi apapun. Agama menjadi salah satu benteng pertahanan terkuat bila banyak sekali serangan yang menyergap. Namun, agama bukanlah sebuah tameng semata, ia harus dihadirkan dalam setiap tutur kata, sikap dan perilaku pemimpin dalam kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, bangsa ini memerlukan pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen tinggi bagi bangsanya. Integritas dan komitmen yang tinggi merupakan sikap yang akan melahirkan tanggung jawab serta kedisiplinan tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia akan menganggap bahwa amanah yang dipegangnya merupakan bentuk kepercayaan dari rakyat pada dirinya. Untuk itu, kepercayaan yang sudah disepakati, jangan pernah sekalipun diingkari, hal ini merupakan satu bentuk integritas dan komitmen tinggi dari seorang pemimpin sejati.

Bila keimanan, integritas dan komitmen tinggi sudah dipenuhi maka selanjutnya seorang pemimpin hendaklah orang yang visioner. Artinya ia memiliki visi jelas yang akan mengarahkan bangsa ini hingga lima tahun kedepan. Tanpa visi yang jelas, ia tidak akan memiliki pencapaian yang jelas pula. Bila sudah demikian, dapat dipastikan Ibaratnya sebuah kapal, seorang calon kepala daerah yang merupakan pemimpin adalah nakhoda yang akan mengarahkan kapal pada suatu dermaga. Ia adalah nakhoda yang akan membawa arah kehidupan bangsa ini hingga lima tahun ke depan.

Hal lainnya yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin ialah, dirinya haruslah orang yang tahan banting. Artinya, ia seorang yang ulet dan pantang menyerah dalam melakukan perubahan. Seorang pemimpin sejati akan lebih menghargai proses ketimbang hasil. Dengan proses dan langkah yang baik, tentu tujuan baikpun akan bisa didapatkan. Saat ini, bila kita melihat kondisi yang terjadi bangsa ini, perubahan dalam berbagai bidang memang sangat diperlukan. Calon kepala daerah yang nantinya memimpin masyarakat ini haruslah orang yang memiliki jiwa ulet, tekun dan pantang menyerah dalam menghadapi beragam rintangan. Ia mampu tampil di depan publik untuk bertindak langsung dalam menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang menyangkut masyarakatnya.

Sumber Daya pendukung pemilihan kepemimpinan Kepala Daerah Visioner secara langsung

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung akan memperkuat dan mengembangkan konsep *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung, maka kepala daerah akan bertanggung jawab kepada rakyat bukan kepada DPRD. Dengan demikian kedudukan kepala daerah kuat sebagai pejabat pelaksana kebijakan politik, oleh karena itu apabila posisi kepala daerah hasil pilihan rakyat didukung oleh DPRD yang aspiratif dan mampu menjalankan fungsinya dengan baik maka konsep *check and balances* akan dapat terlaksana dengan baik, oleh karena itu untuk memilih suatu calon kepemimpinan kepala daerah sangat dibutuhkan pemikiran yang sangat hati-hati, karena pemilihan umum kepala daerah tidak lagi menjadi sarana yang efektif, terjadi persoalan di banyak segi, banyak yang beranggapan bahwa pemilihan umum kepala daerah hanyalah sebagai suatu sarana bagi seseorang yang punya kepentingan tertentu untuk meraih kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat lagi.

Berdasarkan hasil wawancara secara mendalam dengan para informan, dapat diketahui bahwa sumber daya pendukung dalam pemilihan kepemimpinan kepala daerah, yaitu: kepercayaan masyarakat, kualitas calon kepala daerah dan kepribadian calon kepala daerah. Faktor-faktor tersebut merupakan sumber daya pendukung para calon kepemimpinan kepala daerah.

Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya dari pada yang kurang dipercayai (Moorman, 1993).

Menurut Rousseau et al (1998), kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari orang lain. Kepercayaan konsumen dide-

finisikan sebagai kesediaan satu pihak untuk menerima resiko dari tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan penting untuk pihak yang mempercayainya, terlepas dari kemampuan untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan pihak yang dipercaya (Mayer et al, 1995).

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik, baik eksekutif, birokrasi, lembaga peradilan, lembaga perwakilan maupun partai politik adalah sebuah hambatan besar bagi perkembangan demokrasi.

Siahaan (2005) tingkat kepercayaan masyarakat pada demokrasi melemah. Hal itu disebabkan oleh kinerja parpol dan pasangan calon yang buruk. Hotman juga berpendapat, tingkat kepercayaan politik masyarakat, saat ini, mandek setelah menyaksikan penyelenggaraan pilkada. Buktinya, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada lalu sangat rendah yang rata-rata di atas 30 persen.

Hasil penelitian di atas didukung oleh penelitian M. Ikhsan (2005), Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada langsung dilihat dari indikator kuantitatif dapat dianggap belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pelaksanaan Pilkada langsung yang sebenarnya. Hal ini karena dibalik keberhasilan kuantitatif pelaksanaan Pilkada, terdapat berbagai permasalahan baik dari sisi kebijakan, kelembagaan, maupun operasional, serta masalah peraturan perundangan, pendeknya waktu persiapan Pilkada, keberadaan *Desk Pilkada*, maupun permasalahan *money politics* dalam Pilkada. Untuk meningkatkan kepercayaan kepada calon kepemimpinan kepala daerah, partai politik dalam hal harus memperbaiki rekrutmen fungsi rekrutmen.

Partai politik dituntut harus mampu melahirkan calon-calon kepala daerah yang mempunyai kompetensi tinggi, cerdas, jujur dan mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Untuk menciptakan calon-calon kepala daerah yang berkualitas tersebut, partai politik harus menjalankan fungsinya dengan baik, terutama fungsi rekrutmen politik. Rekrutmen politik yakni seleksi dan pengangkatan seseorang calon kepala daerah harus seobyektif mungkin. Jadi, meka-

nisme rekrutmen politik yang dilakukan partai politik terdiri dari dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka akan memungkinkan lahirnya calon-calon legislatif yang betul-betul demokratis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, hal ini dikarenakan oleh proses pengangkatan calon tersebut dilakukan secara terbuka. Sedangkan sistem tertutup merupakan kebalikan dari sistem terbuka, dimana para pemilih tidak mengenal seseorang calon kepala daerah, karena sistem pengangkatan calon kepala daerah tersebut dilakukan secara tertutup. Hal ini memungkinkan timbulnya calon kepala daerah yang tidak kompetitif, berhubung proses pengangkatan tidak diketahui oleh umum.

Fungsi rekrutmen politik ini sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Melalui proses ini akan terus ada orang-orang yang berperan untuk melanjutkannya. Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yaitu bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal : menyiapkan kader-kader dalam pimpinan politik, melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan, serta perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, dan memiliki kredibilitas yang tinggi serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis. Apabila pencalonan kepala daerah tidak selektif maka ini akan menjadi umpan balik yang merugikan bagi kelangsungan partai politik maupun calon kepemimpinan kepala daerah tersebut.

Apabila dicermati fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, parpol saat ini belum mampu mengemban aspirasi masyarakat dalam mengantarkan figur-figur pembangunan yang berintegritas sesuai dengan harapan dan tujuan dibentuknya partai-partai demi kepentingan masyarakat, untuk menjembatani rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak.

Menurut penulis untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, perlu konsistensi. Fungsi merekrut calon kepala daerah harus

benar-benar dilakukan secara ketat dan obyektif, karena yang dilakukan selama ini justru penyimpangan dan penyalahgunaan. Untuk itu, diperlukan perbaikan tingkah laku para politisi dan menjalankan fungsinya dengan benar. Kalau itu dilakukan dengan baik maka pada gilirannya akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat Untuk itu diperlukan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, dengan membangun kepercayaan masyarakat kepada partai politik agar mampu menumbuhkan pencitraan, dengan tindakan nyata untuk mensejahterakan rakyat, dengan mensejahterakan rakyat, kepercayaan masyarakat akan meningkat. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, maka tidak mustahil untuk periode berikut rakyatlah yang akan mengusung untuk tetap menjadi pemimpinnya.

Kualitas Calon Kepala Daerah

Kualitas SDM pada dasarnya adalah tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh SDM. Tingkat pengetahuan, kemampuan dan kemauan itu dibandingkan dengan tingkat yang dibutuhkan dari waktu ke waktu oleh organisasi yang memiliki SDM tersebut (Ruky, 2003). Padahal kalau kita berbicara tentang kualitas, yang dimaksudkan adalah juga aspek visi, motivasi, sikap mental, komitmen, disiplin, dan integritas moral, semuanya itu justru sangat penting dan bersama-sama pengetahuan menentukan keberhasilan organisasi merealisasi visinya. Menurut Masaaki (dalam Kaizen, 1986), istilah kualitas sumber daya manusia adalah tingkat kemampuan dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia. Tingkat itu dibandingkan dengan tingkat yang dibutuhkan dari waktu ke waktu oleh organisasi yang memiliki sumber daya manusia tersebut.

Kualitas seseorang pemimpin pemerintah (kepala daerah) sangat diperlukan sekali, karena merupakan modal intelektual seseorang untuk mengembangkan daerahnya. Modal intelektual adalah materi intelektual, pengetahuan, informasi, hak pemilikan intelektual, pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kemakmuran dan kekayaan. Dengan

demikian modal intelektual terdiri dari: pengetahuan, informasi, hak pemilikan intelektual dan pengalaman (Wasistiono, 2003). Kualitas seseorang merupakan suatu pertimbangan utama dalam menetapkan suatu pilihan untuk memilih calon pimpinan pemerintah (kepala daerah).

Apalagi lagi salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, disamping itu juga sebagai pimpinan satuan organisasi pemerintahan yang mengepalai suatu wilayah pemerintahan tertentu seperti kepala daerah, mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan organisasi lainnya. Pimpinan pemerintahan tersebut sudah seharusnya memiliki dua bentuk kepemimpinan yaitu kepemimpinan organisasional serta kepemimpinan sosial. Perbedaan kedua bentuk kepemimpinan tersebut tergantung pada empat variabel yang mempengaruhinya, yaitu: (a) pemimpin, (b) pengikut, (c) situasi, dan (d) visi dan misi yang diembannya (Wasistiono, 2003).

Pada sisi lain, kepala daerah adalah juga pemimpin kesatuan masyarakat hukum. Oleh karena itu, perlu memiliki kepemimpinan sosial yang berbeda dengan kepemimpinan organisasional. Di dalam kepemimpinan sosial, hubungan antara pemimpin dengan pengikutnya relatif lebih cair karena jumlah, jenis dan karakteristik pengikutnya sangat beraneka ragam. Selain itu, pemimpin sosial perlu lebih banyak menggunakan kapasitas dan kualitas pribadinya untuk menggerakkan bawahannya, dibandingkan menggunakan fasilitas manajerialnya. Pada bentuk kepemimpinan ini, dimensi sosial dan politik lebih dominan dibandingkan dimensi administatif.

Karena kepala daerah harus memiliki kedua bentuk kepemimpinan, maka cara pengisian-nyapun perlu dipertimbangkan kemampuan pada kedua hal tersebut. Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan dan pengaruh, yakni kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin secara suka rela.

Wasistiono (2003) mengemukakan ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan di dalam me-

milih pimpinan pemerintahan (kepala daerah) yang kemudian diharapkan akan menjadi pemimpin, yakni: kapabilitas, akseptabilitas serta kompatibilitas. Kapabilitas adalah gambaran kemampuan diri si pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (*track record*) pendidikannya maupun jejak sikap dan perilakunya selama ini. Pimpinan yang baik tidak akan muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses panjang. Makin tinggi jenjang kepemimpinan semakin diperlukan jejak yang panjang dan lama, karena melalui jejak-jejak tersebut dapat diketahui kemampuan dan pengalaman memimpin suatu entitas kelompok manusia.

Sedangkan akseptabilitas adalah gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin. Kompatibilitas dimaksudkan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan mengakomodasikan kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupun tuntutan dari para pengikutnya. Derajat pentingnya dari ketiga aspek tersebut di atas akan sangat tergantung pada tingkatan dari wilayah pengaruh dari pimpinan pemerintahan.

Kepribadian

Pemilihan pemimpin pemerintahan (kepala daerah) sangat membutuhkan kehati-hatian, karena banyak faktor atau variabel-variabel lain turut menentukan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang. Para pemilih akan menentukan pilihan terhadap calon pimpinan pemerintahan (kepala daerah) berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Perilaku memilih berdasarkan pertimbangan rasional tidak hanya berupa memilih alternatif yang paling menguntungkan atau yang mendatangkan kerugian yang paling sedikit, tetapi juga dalam arti memilih alternatif yang menimbulkan resiko yang paling kecil. Untuk itu diperlukan pertimbangan faktor-faktor yang berpengaruh dalam memutuskan pemilihan calon pimpinan pemerintahan (kepala daerah) yaitu salah satunya adalah kepribadian seorang calon pemimpin pemerintahan.

Kepribadian meliputi segala tingkah laku manusia yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan dirinya terhadap segala rangsang baik yang datang dari luar maupun yang berasal dari dalam dirinya sendiri, sehingga corak perilakunya merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi manusia itu (Maramis, 1990). Kartini K. (1998), mengemukakan bahwa kepribadian adalah suatu totalitas yang terorganisasi dari disposisi psikis. Manusia secara individu yang akan memberi rangkaian terhadap ciri-cirinya yang umum dengan pribadi lainnya. Kepribadian adalah corak dinamisa tingkah laku sosial, dorongan dan keinginan, gerak-gerik corak opini dan sikap.

Shoban (dalam Kartono, 1980), bahwa seseorang yang memiliki kepribadian yang matang dan mental yang sehat ditandai oleh sifat-sifat gembira, optimis, tenang, selain itu individu yang memang juga memiliki kapasitas untuk mencintai, keinginan untuk mencapai tujuan atau mencapai cita-cita, serta mampu memberikan reaksi yang tepat terhadap segala situasi dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Seperti halnya kepribadian seorang pemimpin pemerintahan (kepala daerah) akan tercermin pada sikap dan tingkah laku di dalam menjalankan tugas kepemimpinan.

Berdasarkan hubungan antar individu dengan lingkungan sosialnya, maka Hall dan Lindzey (1993), mengartikan kepribadian sebagai keterampilan sosialnya, artinya kepribadian individu dinilai berdasarkan efektivitas kemampuan seseorang untuk mendatangkan reaksi-reaksi positif dari orang-orang sekitarnya dalam berbagai situasi (Hall dan Lindzey, 1979).

Oleh karena itu untuk memilih calon pimpinan pemerintahan (kepala daerah) perlu mempertimbangkan tentang kepribadiannya. Kepribadian meliputi segala tingkah laku manusia yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan dirinya terhadap segala rangsang baik yang datang dari luar maupun yang berasal dari dalam dirinya sendiri, sehingga corak perilakunya merupakan suatu kesatuan fungsional yang khas bagi manusia itu (Maramis, 1990).

Hubungan antara pemimpin, kepemimpinan kepala daerah sangat erat selain sebagai pimpinan pemerintahan seorang kepala daerah seharusnya juga berperan sebagai pemimpin masyarakat di daerah yang mempunyai berbagai sumber kekuasaan dan mampu melaksanakan kekuasaan secara efektif. Jika pilkada berhasil digelar tapi gagal dalam memunculkan kepala daerah yang memiliki kapasitas dalam mengelola pemerintahan ke arah perubahan yang lebih baik, maka kita jangan berharap banyak terhadap kemajuan masyarakat dan daerahnya, oleh sebab itu, sudah saatnya ada pembelajaran politik bagi masyarakat agar bisa secara cerdas mendorong terjadinya proses seleksi calon kepala daerah yang mengedepankan aspek kemampuan dan memiliki keberpihakan untuk memajukan masyarakat dan daerahnya.

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan, realitanya sampai saat ini belum menghasilkan pemimpin kepala daerah yang sesuai harapan masyarakat, ini disebabkan karena calon kepala daerah terpilih belum tidak mencerminkan ciri-ciri pemimpin yang visioner. Ini dikarenakan pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi sarana yang efektif, terjadi persoalan di banyak segi, banyak yang beranggapan bahwa pemilihan kepala daerah hanyalah sebagai suatu sarana bagi seseorang yang punya kepentingan tertentu untuk meraih kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan rakyat lagi.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi sumber daya pendukung dalam pemilihan kepemimpinan kepala daerah yang mampu menunjang keberhasilan para calon kandidat kepala daerah sangat dipengaruhi oleh: tingkat kepercayaan masyarakat, kualitas calon kepala daerah dan kepribadian dari calon kepala daerah. Tiga aspek tersebut merupakan factor pendukung dalam pertimbangan untuk memilih calon kepemimpinan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, at.all. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan – Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Pitkin, Hanna Fenichel (1967). *The Concept of Representation*, University of California, Barkeley.
- Heywood, Andrew (1997). *Politics*. Macmillan Press, London.
- John Harris, Kristian Stokke, and Olle Tor-nquist. 2004. *Politicising Democracy: The Local Politics of Democratisation*, Palgrave, Macmillan.
- Lembaga Survei Indonesia, “Evaluasi Publik Terhadap DPR dan Ketua DPR Pilihan Masyarakat”, *Laporan Survei LSI: 9-15 September 2009*.
- Liyphart, Arend . 1995. *Electoral System and Party System: A Study of Twenty Seven Democracy 1945-1990*, Oxford University Press, Oxford.
- Lembaga Survei Indonesia, “Evaluasi Publik Terhadap DPR dan Ketua DPR Pilihan Masyarakat”, *Laporan Survei LSI: 9-15 September 2009*.
- Mahendra, A.A. Oka.2005, *Pilkada di Tengah Konflik Horisontal*. Milenium Publisher Jakarta.
- Mas’oed, Mochtar & Collins Mac Andrews, 1995, *Perbandingan Sistem Politik.*, UGM Press, Yogyakarta
- Moleong, Lexy. J. 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Miriam Budiardjo, 1998. “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Demokrasi Terpimpin” dalam *Himpunan Kuliah Politik Dalam Negeri*, Bahan Kursus Singkat Seskoad, Bandung.
- Nawawi, Ismail, 2012, *Metoda Penelitian Kualitatif, Teori dan Aplikasi Interdisipliner*, CV. Dwiputra Pustaka Jaya, Jakarta.
- Priyono, AE, Willy Purna Samadhi, Olle Tor-nquist, dkk., 2007. *Menjadikan Demokrasi Bermakna: Masalah dan Pilihan di Indonesia*, Demos, Jakarta.
- Saiful Mujani, “Deparpolisasi Pilkada?”, *Media Indonesia*, 27 Juni 2005.
- Saragih, Bintan R. (1997) *Fungsi Perwakilan, Pembuatan Keputusan, dan Pembentukan Legitimasi*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Depdagri, Jakarta.